

ABSTRAK

Maria Filyssia Priscilla (01659180011)

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN DI ERA JKN

(xv + 130 halaman)

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam kehidupan, Pemerintah bertanggung jawab memberikan Jaminan Kesehatan Nasional yang mengacu pada sistem jaminan sosial nasional. Jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan berupa pelayanan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Manfaat jaminan kesehatan diberikan kepada fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan dalam pembahasan ini adalah rumah sakit swasta. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan yang secara paripurna menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit milik swasta dimungkinkan untuk mendapatkan *profit*, namun tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsi sosial dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional yaitu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan. Kewajiban yang dilaksanakan oleh rumah sakit swasta yaitu mengikuti persyaratan sesuai dengan peraturan yang berhubungan dengan jaminan kesehatan. Rumah sakit swasta yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan diwajibkan memiliki akreditasi, bertujuan untuk menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu wajib mengikuti standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Tarif INA CBGs merupakan sistem paket pembayaran berdasarkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit swasta. Rumah sakit dalam melaksanakan fungsi sosial tetap berhak mendapatkan imbalan jasa, namun pada kenyataannya problematika yang terjadi pada rumah sakit swasta yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu masih belum dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Tanggung jawab hukum rumah sakit meliputi perdata, pidana dan administratif. Teori yang digunakan adalah Negara Kesejahteraan, Kepastian Hukum dan Sistem Hukum menurut Friedman. Untuk mengetahui pelaksanaan tersebut, diperlukan penelitian dengan metode yuridis normatif pendekatan empiris yaitu dengan studi kepustakaan dan metode wawancara dengan rumah sakit swasta.

Referensi : 89 (1981-2019)

ABSTRACT

Maria Filyssia Priscilla (01659180011)

LEGAL RESPONSIBILITY OF PRIVATE HOSPITAL TOWARD HEALTH SERVICES TO PATIENTS IN JKN (NATIONAL HEALTH INSURANCE) ERA

(xv + 130 pages)

Health is one of the important indicators in life. The government is responsible for providing National Health Insurance which refers to the national social security system. The Social security is a form of social protection to ensure that all people meet the basic needs of a decent life. Health insurance is organized by BPJS Health. Health insurance benefits in the form of personal services include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. Health insurance benefits are provided to public or private health facilities in collaboration with BPJS health. The health facility in this discussion is a private hospital. The hospital is a comprehensive individual health service institution that provide inpatient, outpatient and emergency services. Private hospitals are possible to get profit, but are still required to carry out social functions in support of the national health insurance program, which is organized by BPJS Health. Private hospitals that work BPJS Health have responsibilities that give rise to rights and obligations in providing health services to participants. Obligation carried out by private hospitals are to follow requirements in accordance with regulations relating to health insurance. Private hospitals in collaboration with BPJS health are required to have accreditation, aimed at ensuring the quality and safety of health services to patients. In addition, it follows the tariff standards set by the government, namely the INA CBGs tariff is a payment package system based on health services provided by private hospitals. Hospitals in carrying out social functions are still entitled to receive service fees, however in reality the problems that occur in private hospitals that have carried out their obligations have not yet been paid by BPJS Health. Hospital legal responsibilities include civil, criminal and administrative. The theory used is the Welfare State, Legal Certainty and Legal System according to Friedman. To find out the implementation, a normative juridical approach to empirical approaches is needed, namely the literature study and interview methods with a private hospital.

Reference: 89 (1981-2019)